

ISU-ISU DEMOKRASI SEBAGAI BASIS MODERN KONTEMPORER PEMIKIRAN DALAM ISLAM

Marlenda, Paudji Astuti, Virda Amelia Febriana

Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: marlenda.app111@gmail.com, paujdiastuti123@gmail.com, virdafebrianay070@gmail.com

Abstract

This journal aims to examine the concepts of contemporary Islamic thought. Adults, the concepts of thought about Islam continue to develop according to the period of social change. In Islamic teachings invites all human beings to continue to seek knowledge and use their minds as well as possible. This is what makes the concept of Islamic thought changeable or dynamic. Islam serves as the guardian of culture and thought in order to bring prosperity to humans. In this modern era, there are many contemporary issues in the Islamic world that are developing, such as issues of democracy, issues of pluralism, issues of terrorism and others. Therefore, the obligation as a Muslim is to be able to think rationally and also think critically to negate this and not to create an apathetic and anarchic society. It is this open attitude that makes it the main resolution to break this up.

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep pemikiran Islam kontemporer. Dewasa konsep-konsep pemikiran tentang Islam terus berkembang sesuai masa gerak perubahan sosialnya. Dalam ajaran Islam mengajak semua umat manusia untuk terus menuntut ilmu dan menggunakan akalnyanya dengan sebaik mungkin. Hal tersebut yang membuat konsep pemikiran Islam berubah-ubah atau dinamis. Agama Islam berfungsi sebagai penjaga budaya dan pemikiran agar membawa kesejahteraan bagi manusia. Pada zaman modern ini banyak sekali isu-isu kontemporer dalam dunia Islam yang berkembang seperti isu demokrasi, isu pluralisme, isu terorisme dan lainnya. Maka dari itu kewajiban sebagai umat muslim yaitu harus mampu berpikir secara rasionalis dan juga berpikir secara kritis untuk menegaskan hal tersebut dan agar juga tidak menciptakan masyarakat yang apatis dan anarkis. Sikap yang terbuka lah yang menjadikannya resolusi utama untuk memecah hal tersebut.

Kata Kunci: Isu-isu Demokrasi, Basis Modern Kontemporer Pemikiran Islam

PENDAHULUAN

Sejarah demokrasi saat ini menyerupai slogan yang sangat menggiurkan karena terlihat seperti bentuk pemerintahan yang mendorong eksistensi dan memungkinkan rakyat dan penguasa

hidup berdampingan secara damai. Banyak orang tidak menyukai sistem demokrasi ketika pertama kali dimulai. Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak terlalu berguna dalam politik karena demokrasi hanya memainkan peran kecil saat itu. Polybius dan penulis lain memperluas demokrasi dengan berargumen bahwa konstitusi dengan bagian monarki, aristokrasi, dan demokrasi yang setara bisa stabil. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam buku Plato Republic (Minogue, 2008).

Demokrasi pada masa itu secara umum dianggap agresif, tidak stabil, dan rentan terhadap tirani. Karena istilah “demokrasi” yang sebelumnya lebih diartikan sebagai alat pemerintahan daripada sumber kekuasaan, kini dianggap sebagai produk. Gagasan demokrasi berkembang sekitar pergantian abad ke-19 untuk memasukkan hak-hak sipil, perwakilan parlementer, dan gagasan politik lainnya seperti keinginan liberal; akibatnya, demokrasi liberal masih merupakan bentuk demokrasi yang paling umum saat ini (Holden, 2008). Puncak perkembangan moral manusia dapat dilihat dalam berbagai keadaan tersebut. Saat itu, politik hanya untuk pria dewasa. Baru belakangan ini menjangkau wanita, kelompok pemuda berusia 18 tahun, dan bahkan pasien di rumah sakit jiwa menikmatinya.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka ini adalah metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis data yang ada menggunakan berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain. Penelitian studi kepustakaan bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu masalah yang diteliti secara baik.

PEMBAHASAN

Demokrasi

Suatu sistem politik dan pemahaman demokrasi didasarkan pada gagasan “kekuasaan rakyat”, atau kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. bahwa kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan adalah milik rakyat. Diyakini bahwa demokrasi, baik sebagai sistem politik maupun doktrin, lebih unggul dari sistem politik lain yang ada di hampir setiap bangsa dan negara. Gagasan demokrasi begitu kuat sehingga menjadi keyakinan politik atau “keyakinan

polisi” sebagian besar bangsa, yang pada gilirannya menjadi mitos yang diyakini dapat menguntungkan bangsa-bangsa beradab (Natsir, 2009).

Gagasan kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, merupakan landasan demokrasi. Sementara itu, para ahli mendefinisikan demokrasi sebagai berikut: “demokrasi adalah rencana institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan bagaimana bersaing secara kompetitif untuk suara rakyat,” menurut Joseph A. Schmeter. Affan Gaffar memandang demokrasi dalam dua cara: pertama, sebagai makna normatif (demokrasi empiris), dan kedua, sebagai makna normatif (demokrasi normatif). Bentuk demokrasi ideal suatu negara adalah demokrasi normatif. Sebaliknya, demokrasi empiris adalah demokrasi seperti yang dipraktikkan dalam politik dunia nyata. Azra, 2010).

Akibatnya, makna demokrasi sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengandung makna bahwa rakyat mengambil keputusan atas kehidupannya, termasuk bagaimana menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Akibatnya, negara yang diatur menurut sistem demokrasi adalah negara yang diatur sesuai dengan kehendak rakyat. Dari perspektif organisasi, demokrasi mengacu pada cara negara diatur oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan mereka karena rakyat memiliki kedaulatan.

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan menekankan pada penguasaan rakyat atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Fakta bahwa rakyat menguasai pemerintahan mengandung tiga hal: pertama, pemerintahan rakyat (rakyat government); kedua, pemerintahan rakyat; ketika pemerintahan rakyat lahir. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang ketiga prinsip tersebut di atas dapat dilaksanakan dan ditegakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

Selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, era saat ini mengungkapkan aspek politik, budaya, dan ekonomi penting yang terjadi di Timur Tengah, negara-negara Barat, dan

¹ Rodhatul Jennah dkk, *Isu-isu Dunia Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021), hlm. 108-109.

negara-negara Asia. Penelitian Christopher Rootes,² Sean O'Hagan,³ dan David Crystal,⁴ menunjukkan hal ini. Era modern juga menghadapi beberapa kesulitan dan kesulitan. Kajian ini, di sisi lain, berfokus pada sejumlah isu dan tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini yang terkait dengan pengaruh gagasan dan gerakannya.

Sepanjang abad ke-20, sejumlah mazhab pemikiran politik Islam muncul akibat paradigma politik Timur Tengah, India dan Pakistan yang mencerminkan dominasi “agama”, dan pemikiran politik dunia Barat yang mencerminkan dominasi “negara”. yaitu, bagaimana konservatisme, fundamentalisme, modernisme, sekularisme, dan liberalisme semuanya didasarkan pada konsep “agama” dan negara bangsa, dan bagaimana pemahamannya.

Aspek lain yang menarik dari masyarakat Islam kontemporer adalah masih adanya “kebingungan” di kalangan sebagian umat Islam tentang bagaimana menyikapi persoalan hubungan Islam dengan negara. Model “kebingungan” ini sebenarnya dialami tidak hanya oleh umat Islam di Indonesia, tetapi oleh umat Islam di semua negara yang mayoritas beragama Islam. Akibatnya, identitas dan fungsi Islam dalam negara tidak pernah jelas, dan ini tercermin dalam fenomena pemikiran dan tindakan politik dunia Islam.

Modernisasi

Menurut bahasa “modern” berarti baru, akhir, kekinian, up-to-date, kekinian dan lain sebagainya. Sedangkan modernisasi yaitu suatu proses untuk menjadikan sesuatu itu modern. Berbeda dengan Kategorisasi *hadharah* dan *madaniyah* untuk menyaring modernisasi yang diperkenalkan syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab “Nidzamul Islam”. *Hadharah*, yang banyak diartikan peradaban, sedangkan *madaniyah* didefinisikan sebagai bentuk-bentuk materiil berupa benda-benda hasil karya manusia yang digunakan dalam kehidupannya.

Realitas “Negara Modern” dan “Islam Modern”

² Martin Klimke dan Joachim Scharloth, *Europe: A History of Protest and Activism, 1956-1977* (New York: Palgrave MacMillan, 2008), 295-305.

³ Sean O'Hagan, “Everyone to the Barricades,” *The Observer*, 20 Januari 2008.

⁴ David Denison dan Richard M. Hogg, *A History of the English Language* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 420-439.

Negara bangsa merupakan fenomena sejarah yang tidak dapat dihindari oleh bangsa manapun, termasuk Indonesia. Negara-bangsa adalah konsep negara modern yang menjanjikan solusi bagi setiap bangsa atas realitas pluralisme, toleransi, dan demokrasi di samping tuntutan global. Setiap akademisi, pemikir, dan praktisi negara perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang fenomena negara modern karena, sejak konsep negara-bangsa atau negara bangsa pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19, dunia Islam dihadapkan pada masalah baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sejak awal abad ke-20, ketika berbagai gerakan nasional mulai bermunculan di lingkungan kolonial, gerakan Islam lebih fokus pada isu-isu sosial, khususnya pendidikan, kemajuan sosial ekonomi, dan dakwah Islam menurut keyakinan agama. setiap struktur gerakan.⁵

Konsep modernitas yang paling signifikan adalah negara dalam arti negara bangsa. Para intelektual dan pemimpin gerakan Indonesia telah mencoba memikirkan negara modern dari perspektif ini. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa ada tiga macam konsep negara dalam situasi ini. Pertama, negara dipandang sebagai kumpulan lembaga eksekutif, legislatif, dan administratif pusat dan daerah, serta lembaga yudikatif, kepolisian, dan militer. Kedua, definisi Marx tentang sifat struktural negara adalah bahwa negara tidak lebih dari lokasi di mana eksekutif dapat mengejar kepentingan kelas. Ketiga, memikirkan negara sebagai cara masyarakat menyebarkan ide-ide ideal. Menurut model ini, negara dipandang sebagai kekuatan independen yang menang atas semua kelompok dan kepentingan sosial.⁶

Konsep Islam tentang negara modern kemudian dibahas. Karena umat Islam saat itu belum menemukan konsep model negara bangsa, melainkan model kepemimpinan khilafah berupa monarki dalam format khilafah, amr, uln, dan al-mamlakah, maka Islam masih jarang dan belum pernah ada. bahkan menawarkan konsep kenegaraan modern dan implementasinya. Karena Islam terlalu besar untuk dilawan dengan negara, maka belum ditemukan, bahkan mungkin model kenegaraan yang paling ideal bagi umat Islam pun belum ditemukan. Akibatnya, memahami

⁵ Dawam Raharjo, "Agama Masyarakat dan Negara," dalam Mukti Ali, dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Jakarta: Tiara Wacana, 1998), h. 131.

⁶ *Ibid*, h. 137-139.

realitas negara modern harus mendapat banyak manfaat dari pengalaman sejarah Islam yang luas dengan institusi kekuasaan dan berbagai model dan bentuk kekuasaan yang telah digunakan dalam komunitas Islam. Menurut buku Mac Iver *The Modern State* yang dikutip Rumadi, tujuan negara pada hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang bahagia.⁷ yang dapat membawa kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Menurut John L. Esposito, ada tiga orientasi umum pola perkembangan negara modern dalam politik Islam: negara sekuler, negara berdasarkan Islam, dan negara Muslim.⁸

Modernisasi Pendidikan Islam

Umat Islam saat ini menghadapi tantangan berat dari pihak luar yang dapat mempengaruhi kehidupan beragama mereka di masa depan. Rintangan-rintangan tersebut mulai dari imperialisme dan kolonialisme yang berujung pada benturan keras antara budaya Barat dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, hingga materialisme, kapitalisme, dan industrialisme yang semuanya berhasil mengubah struktur sosial dan cara berpikir. Mengingat tantangan di atas, para cendekiawan Muslim dan orang-orang terpelajar melakukan berbagai upaya modernisasi yang muncul dalam bermacam-macam dan sifat yang berbeda. Pengaturan sosio-historis modernis sesuai dengan ini.

Pendidikan adalah pendekatan yang paling efektif dan mendasar untuk berbagai inisiatif modernisasi. Pengalihan nilai dan ajaran Islam secara terencana dan sistematis dapat dilakukan melalui pendidikan ini. Salah satu strategi untuk solusi jangka panjang untuk masalah komunitas Muslim saat ini dan masa depan adalah memodernisasi pendidikan. Oleh karena itu, modernisasi pendidikan Islam sangat penting bagi perkembangan peradaban Islam modern. Di sisi lain, modernisasi pendidikan Islam adalah proses panjang yang membutuhkan setidaknya dua generasi untuk menyelesaikannya. Untuk menghasilkan pemikir dan intelektual yang handal dan berperan sentral dalam pembangunan, setiap lembaga pendidikan Islam harus mendapat perlakuan yang serius mengingat pentingnya modernisasi pendidikan Islam.

⁷ Rumadi, "Agama dan Negara; Dilema Regulasi Kehidupan Beragama di Indonesia", dalam *Istiqra', Jurnal Penelitian Ditperta's*, Volume 04, Nomor 01, 2005, h. 119.

⁸ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, h. 132-133.

Modernisasi pendidikan Islam harus terlebih dahulu fokus pada tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yang meliputi tujuan tertinggi, yaitu mendidik peserta didik untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Tujuan umum tersebut secara operasional dirumuskan dalam tujuan institusional, kurikuler, dan instruksional pendidikan Islam.

Menanggapi Politik Islam Saat Ini dan Kedepan

Negara-negara Muslim menghadapi tantangan yang banyak dan rumit. Di sisi lain, harapan agar Islam dapat menjadi fondasi negara bangsa tidak bisa dan tidak boleh dipatahkan begitu saja. Sejarah Indonesia harus dipahami sebagai Indonesia yang melakukan kontak intelektual dengan Barat melalui kolonialisme Portugis dan Belanda. Akibatnya, persepsi bangsa Indonesia terhadap kolonialisme (Barat) saat itu negatif. Di sisi lain, masyarakat India memiliki kesan yang baik terhadap dunia Arab, khususnya Yaman, Saudi, dan Mesir, ketika melakukan kontak intelektual dengan dunia Arab (dan India) terkait masalah keyakinan suatu agama dan memperkenalkan Islam kepada mereka. wilayah Indonesia.⁹

Sejarah panjang dan termasyhur hubungan Indonesia antara Islam dan negara seharusnya menjadi sumber inspirasi sekaligus pelajaran yang berguna untuk menentukan sikap menghadapi tantangan yang akan datang. Gagasan-gagasan baru tentang Islam politik atau Islam politik yang diharapkan mampu mengekspresikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan penegakan hukum, keterbukaan, kesetaraan gender, pluralisme, masyarakat sipil, dan toleransi perlu dikembangkan di masa mendatang. Mayoritas pemikiran dan praktik politik Islam mengambil tema-tema ini. Menurut Nurcholis Madjid, Islam di Indonesia memang dituntut untuk mewujudkan nilai-nilai peradabannya pada masa reformasi ini, terbukti dengan empat khalifah pertama dan masa kesalehan Islam. Wawasan modern di Indonesia menurutnya akan dibentuk oleh nilai-nilai Islam di Indonesia.

Menurut M. Syafi'i Anwar, idealis atau realistik dipandang sebagai respon yang baik dari para sarjana Muslim Indonesia dan harus dipertahankan secara proporsional. Sebab, cara berpikir baru ini diharapkan dapat membantu menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Islam, politik, dan negara dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan Indonesia saat ini dan yang

⁹ Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. xvi.

akan datang. Selain itu, mencegah munculnya konflik horizontal, seperti yang melibatkan keyakinan atau identitas agama.¹⁰

Berikut adalah beberapa pandangan tentang cara menghadapi perbedaan identitas: Pertama, pandangan kaum primordialis. Konflik kepentingan etnis dan agama, menurut kelompok ini, terutama disebabkan oleh perbedaan genetik ras, etnis, dan agama. Kedua, perspektif para instrumentalis. Mereka mengatakan bahwa suku, agama, dan identitas lain seperti partai, organisasi massa, dan sebagainya dipandang sebagai alat yang digunakan orang atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, materi dan non-materi. Politisi dan elit lebih sering menggunakan konsepsi ini untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Misalnya, diharapkan semua umat Islam akan bersatu untuk mendukung tujuan politik mereka dengan meneriakkan "Islam". Akibatnya, para instrumentalis percaya bahwa selama orang mau mengalah pada preferensi elit, bentrokan antar kelompok identitas tidak akan terjadi.

Ketiga, ada konstruktivis yang percaya bahwa identitas kelompok tidak kaku atau mudah dimanipulasi oleh elit seperti yang diyakini oleh para instrumentalis. Bagi kelompok konstruktivis, etnisitas dapat diolah untuk menciptakan jaringan hubungan sosial-politik. Etnisitas dan bentuk keragaman lainnya, sebagai akibatnya, merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Mereka memandang perbedaan sebagai berkah dan kesetaraan sebagai berkah.

Sistem birokrasi, KKN, kemiskinan, dan pengangguran, serta isu-isu internasional seperti globalisasi, hak asasi manusia, pluralisme, kesetaraan gender, fenomena terorisme, dan sebagainya, semuanya harus disikapi dalam dinamika isu-isu Islam dan negara. harus diperhatikan dalam hubungan mereka.

KESIMPULAN

Politik dalam Islam sudah seharusnya lebih jelas bahwa politik atau siyasah dalam Islam itu makna awalnya adalah mengurus, memang atau mengatur urusan sosial masyarakat.

¹⁰ Lebih lanjut, mengenai tipologi pemikiran politik di Indonesia dapat di lihat dalam, Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam ...*, h. 143-184.

Berkecimpung dalam politik berarti mempertahankan dan mengurus kondisi dan persoalan masyarakat, persoalan rakyat. etika politik diandang sangat perlu dalam islam karena politik itu berkenaan dengan prinsip islam dalam pengelolaan masyarakat. Berpolitik sering menyangkut hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati, menghargai, saling menghargai hak orang lain, saling menerima, dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Mengapa umat Islam harus memiliki kepedulian politik? karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna. Seperti ungkapan bahwa tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Di dalam Islam pun, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Rodhatul Jennah dkk 2021, Isu-isu Dunia Islam Kontemporer, Yogyakarta:K-Media.
- Martin Klimke dan Joachim Scharloth,2008. Europe: A History of Protest and Activism, 1956-1977,New York: Palgrave MacMillan.
- Sean O’Hagen, 2008. “Everyone to the Barricades.
- David Denison dan Richard M, 2006. Hogg, A History of the English Language (Cambridge: Cambridge University Press
- Dawam Raharjo, 1998.“Agama Masyarakat dan Negara, Jakarta: Tiara Wacana.
- Rumadi, 2005. “Agama dan Negara; Dilema Regulasi Kehidupan Beragama di Indonesia”, dalam Istiqra’, Jurnal Penelitian Ditpertaiss, Volume 04, Nomor 01.
- Nurcholish Madjid, 1999. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta, Paramadina.